



BUDGET IN BRIEF

APBN 2015

REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:

Askolani

Editor:

Kunta W.D. Nugraha

Kontributor:

Kurnia Chairi

Didik Kusnaini

Adinugroho Dwiutomo

Heru Wibowo

Agus Kuswantoro

Wawan Sunarjo

Para pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN

Desain dan layout:

Kandha Aditya Sandjoyo

BUDGET IN BRIEF

APBN 2015

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya kami dapat menyelesaikan *Budget in Brief* untuk pertama kalinya di Indonesia. *Budget in Brief* Indonesia ini disusun berdasarkan APBN 2015 yang telah disetujui DPR RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 29 September 2014. APBN 2015 ini berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya, karena disusun sebagai *baseline* pada masa transisi pemerintahan yang baru periode tahun 2015-2019.

Periode tahun 2015-2019 merupakan RPJMN Ketiga yang memfokuskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Pada APBN 2015, besaran defisit sebesar 2,21% terhadap PDB lebih rendah dibandingkan APBNP 2014 sebesar 240 % terhadap PDB. Hal ini menunjukkan keinginan Pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk menampung visi dan misi pemerintahan baru. APBN 2015 juga merupakan tahun pertama yang memuat alokasi Dana Desa sebagai wujud dari implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa tersebut diharapkan dapat membawa dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.

Tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua kontributor yang telah membantu kami dalam mengerjakan *Budget in Brief* Indonesia ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan DJA yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan *Budget in Brief* Indonesia ini.

Semoga *Budget in Brief* Indonesia ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman atas APBN 2015 yang lebih luas kepada para pembaca maupun masyarakat luas (akademisi, pelaku ekonomi dan mahasiswa). *Budget in Brief* Indonesia ini tentunya memiliki kekurangan, untuk itu kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Dengan demikian, kami berharap semoga *Budget in Brief* Indonesia ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.

Terima Kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2014

Muhamad Chatib Basri



HAL-HAL BARU



BASELINE BUDGET

APBN 2015 disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. *Baseline budget* memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tetap memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian.



DANA DESA

Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



RINCIAN BELANJA

Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program serta revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.



FORMAT BARU

Format penulisan Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

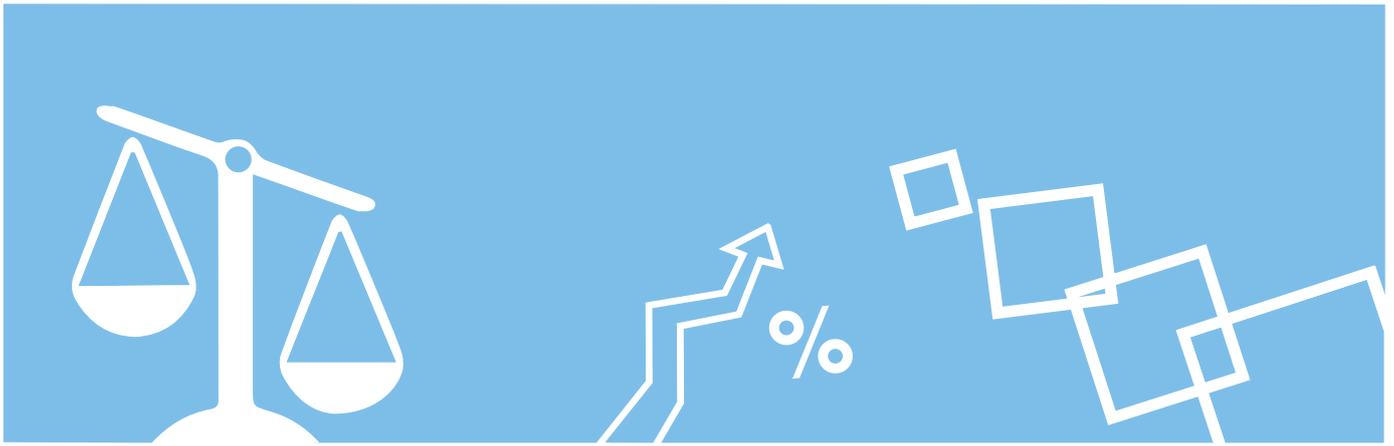
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015

MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN



Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI





ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

TIGA LANGKAH UTAMA

Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.

Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur APBN 2015.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015.

APBNP		APBN
2014		2015
5,5	 pertumbuhan ekonomi (%)	5,8
5,3	 inflasi (%)	4,4
6,0	 suku bunga SPN 3 bulan (%)	6,0
11.600	 nilai tukar (IDR/USD1)	11.900
105	 harga minyak (USD/barel)	105
818	 lifting minyak (ribu barel/hari)	900
1.224	 lifting gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.248



APBN 2015



↑ 9,7%
meningkat dari APBNP 2014



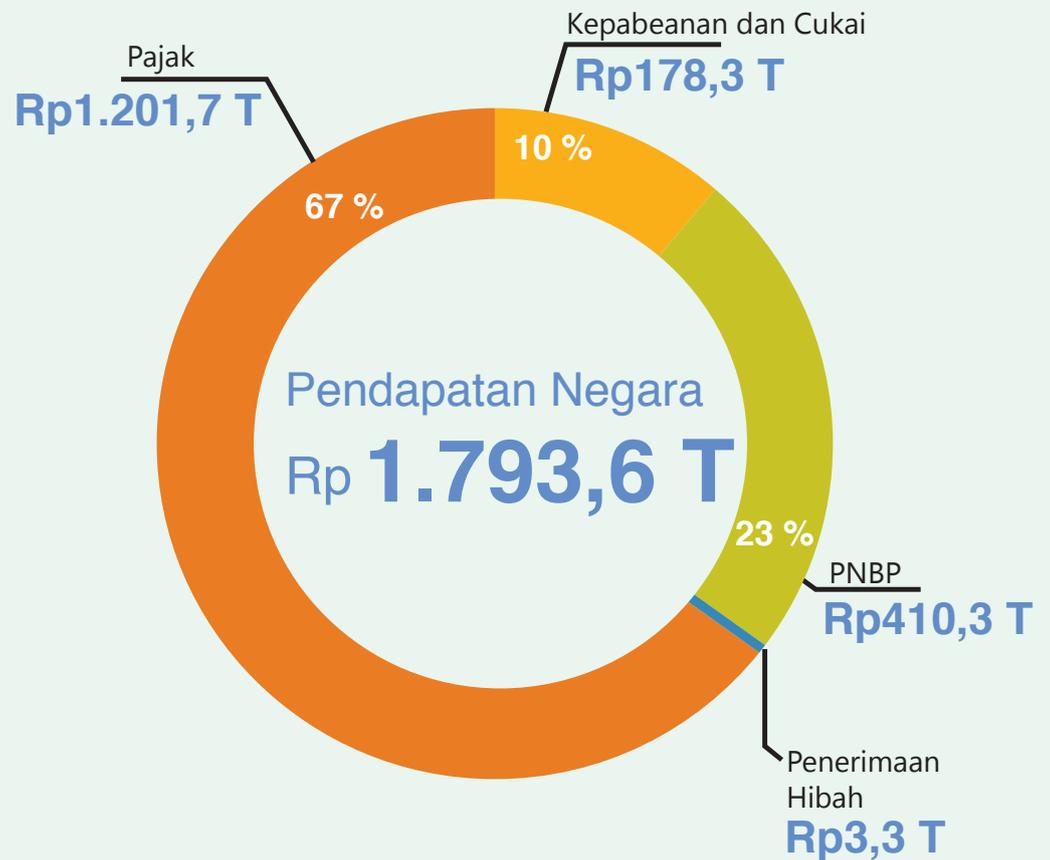
↑ 8,7%
meningkat dari APBNP 2014

APBNP 2014



* Keseimbangan primer menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakannya untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

PENDAPATAN NEGARA 2015



Pajak

Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanaan dan Cukai

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP

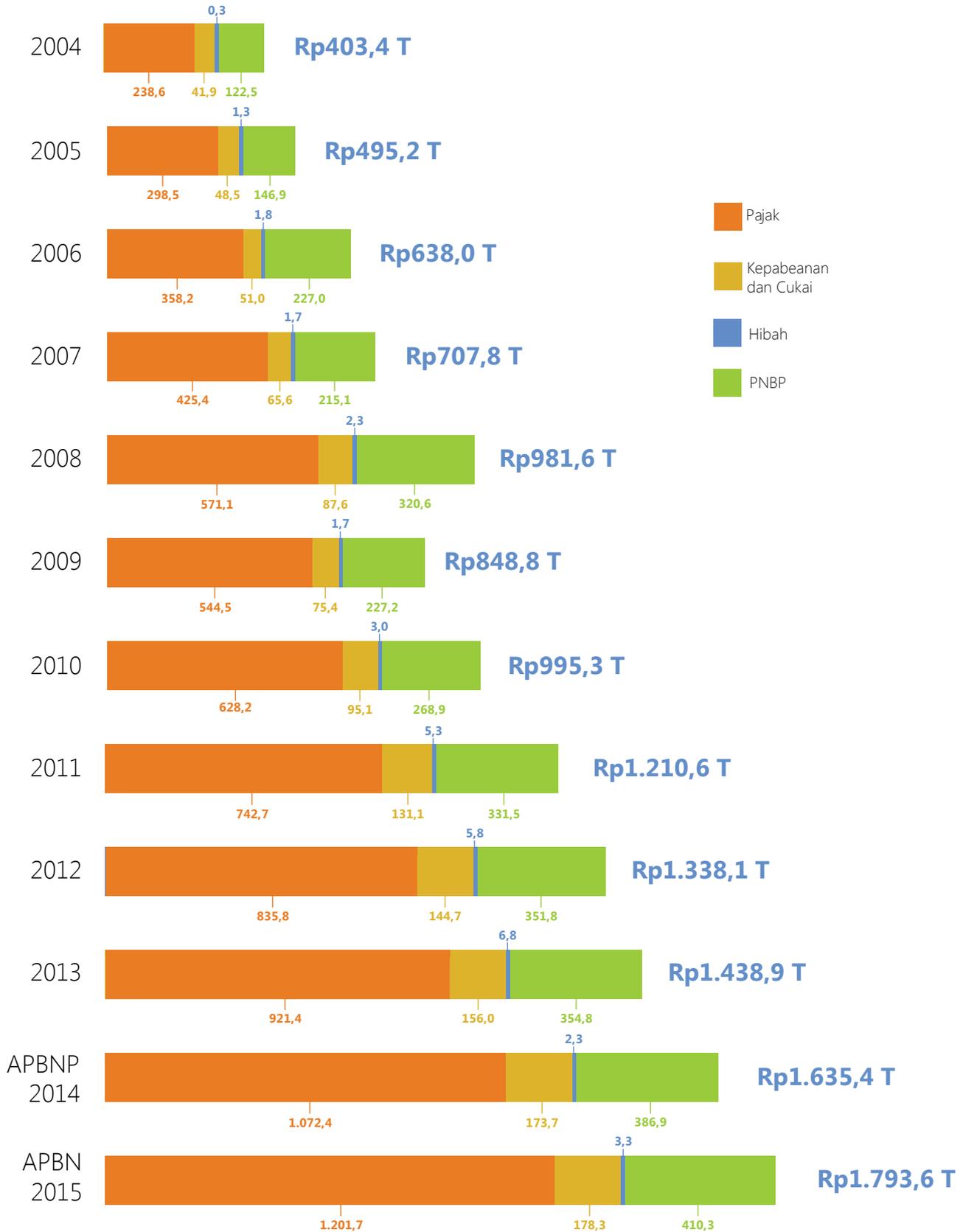
Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Penerimaan Hibah

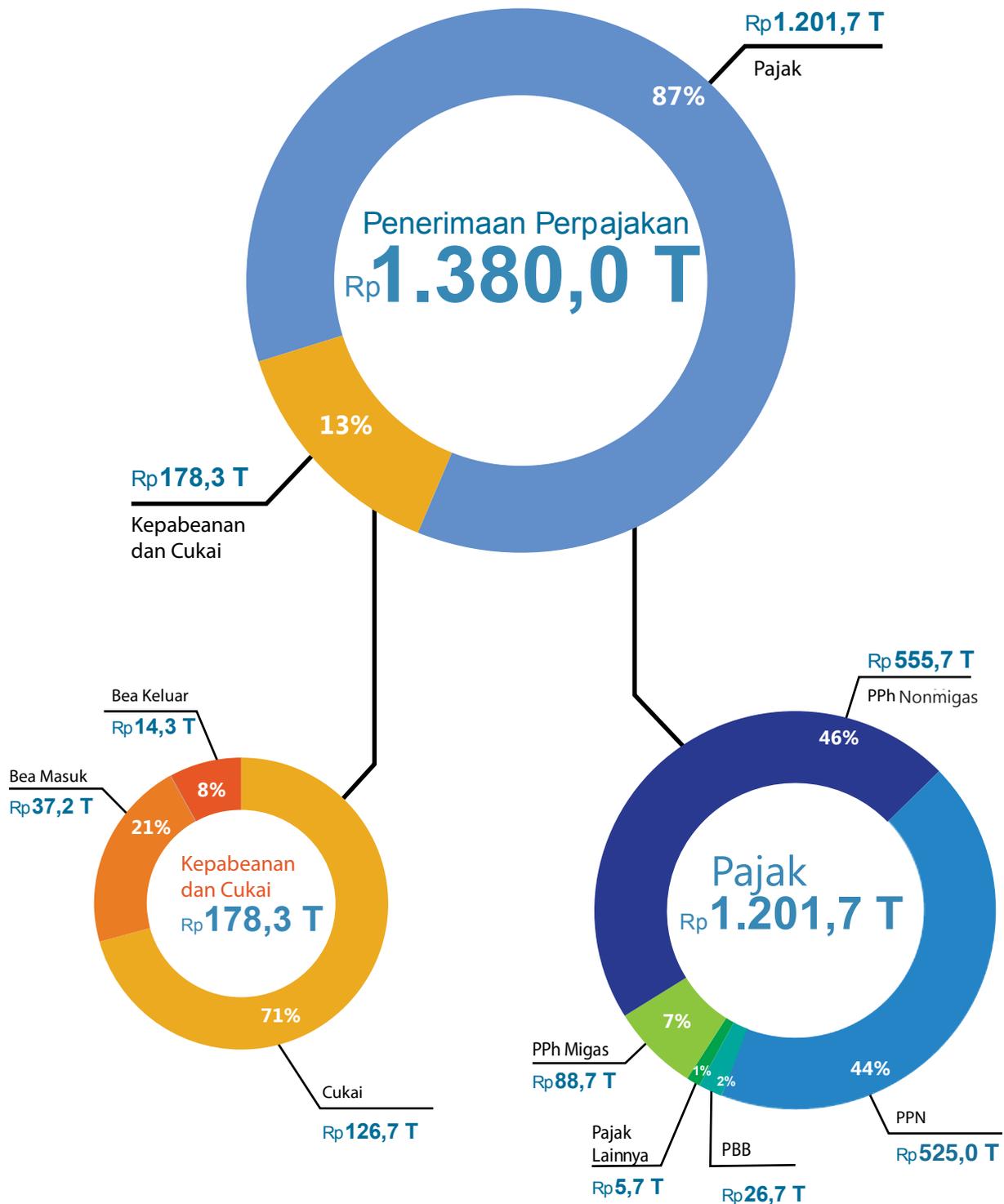
Merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

PENDAPATAN NEGARA 2004-2015

TRILIUN RUPIAH



PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015



PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015

KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015

Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor *non tradable* seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis.

Pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh.

Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai.

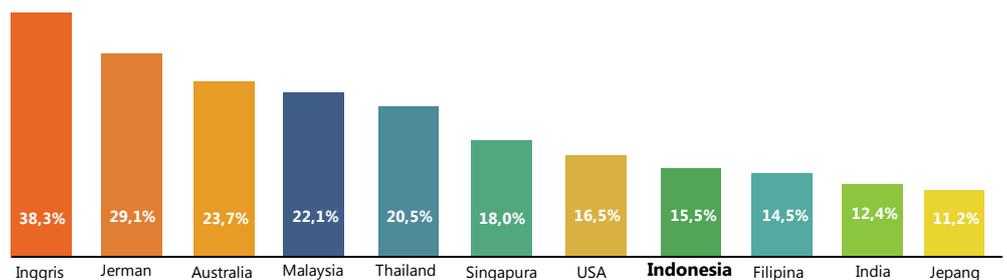
TAX RATIO



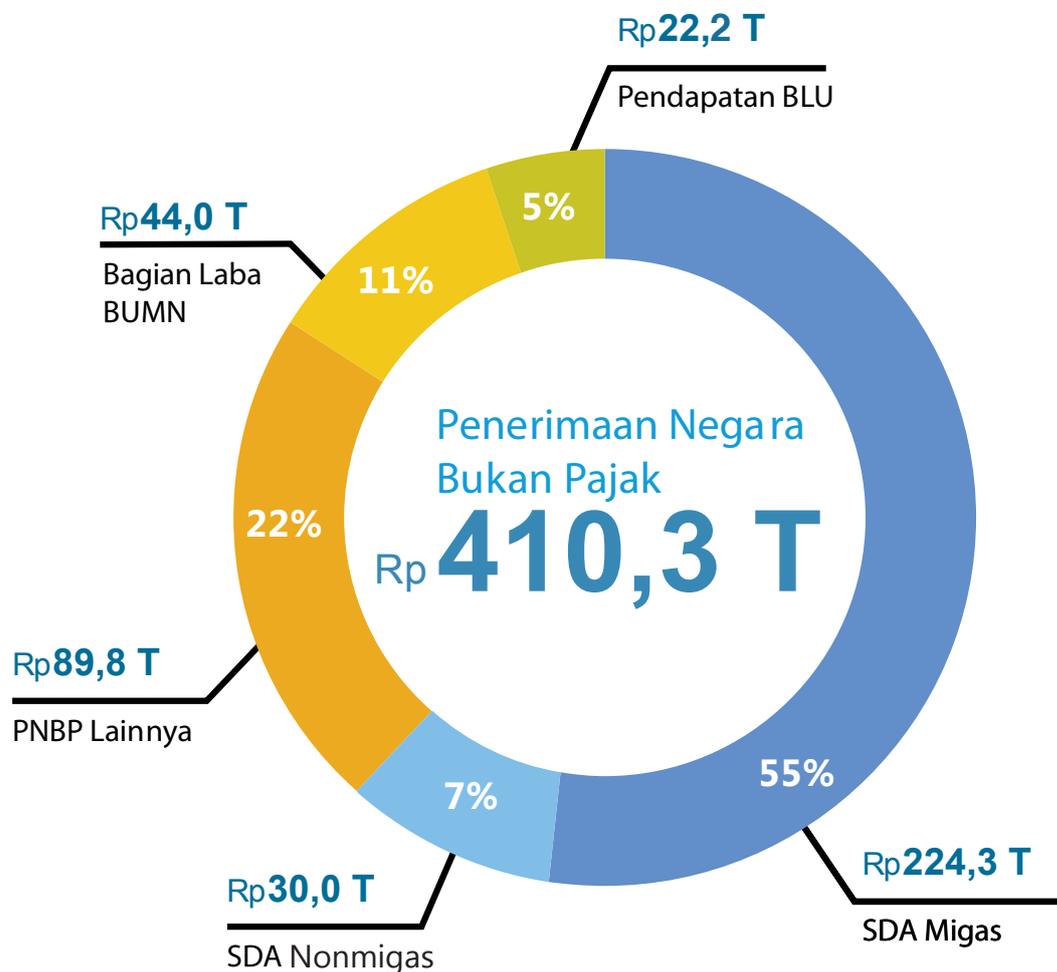
Tax ratio dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), pajak daerah dan penerimaan SDA migas dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Tax ratio untuk tahun 2015 di targetkan sama dengan APBNP 2014 (definisi sempit).

PERBANDINGAN TAX RATIO 10 NEGARA 2012



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2015



KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2015

Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian *cost recovery*).

Penyesuaian tarif PNPB dan ekstensifikasi.

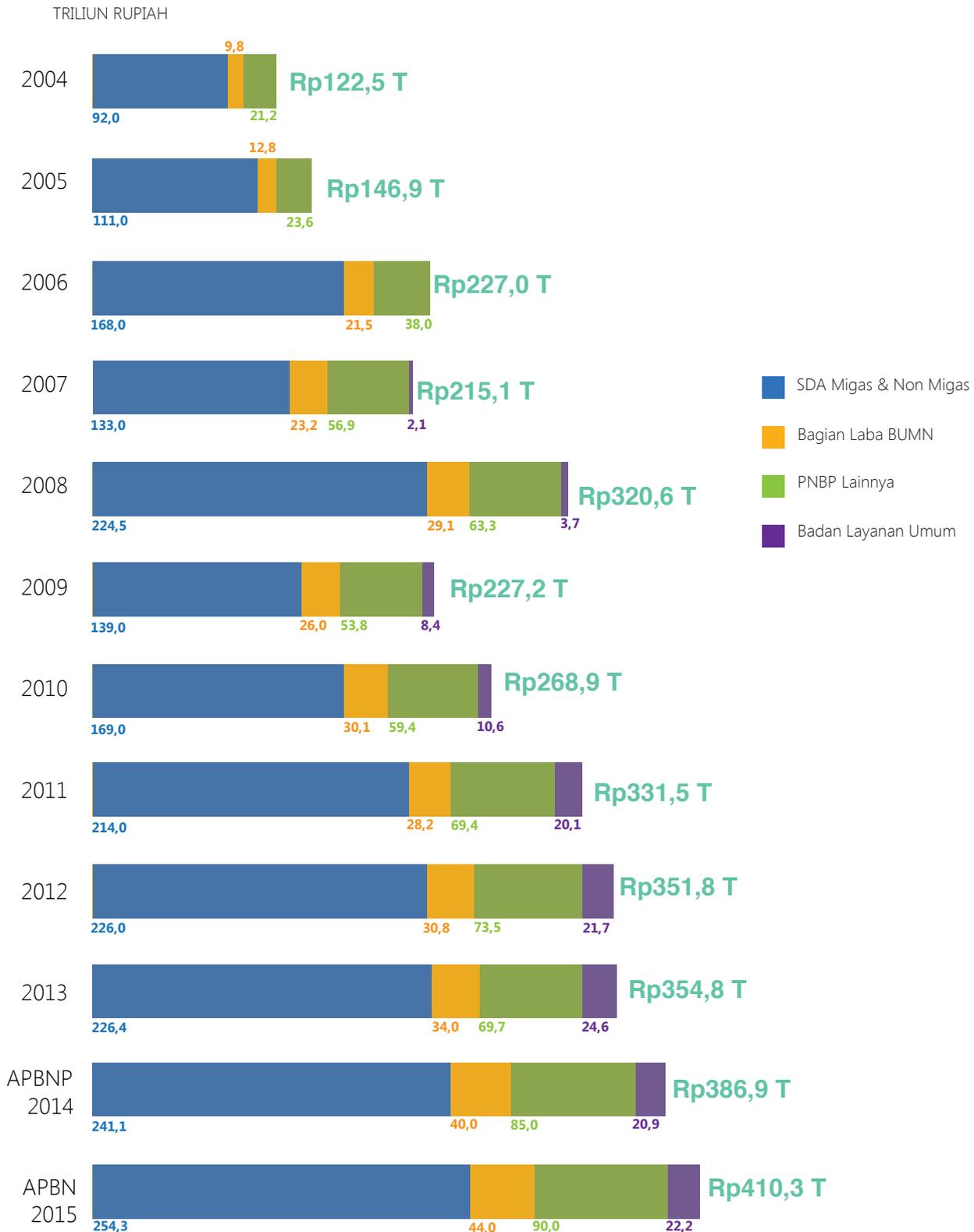
Peningkatan kinerja BUMN.

Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNPB.

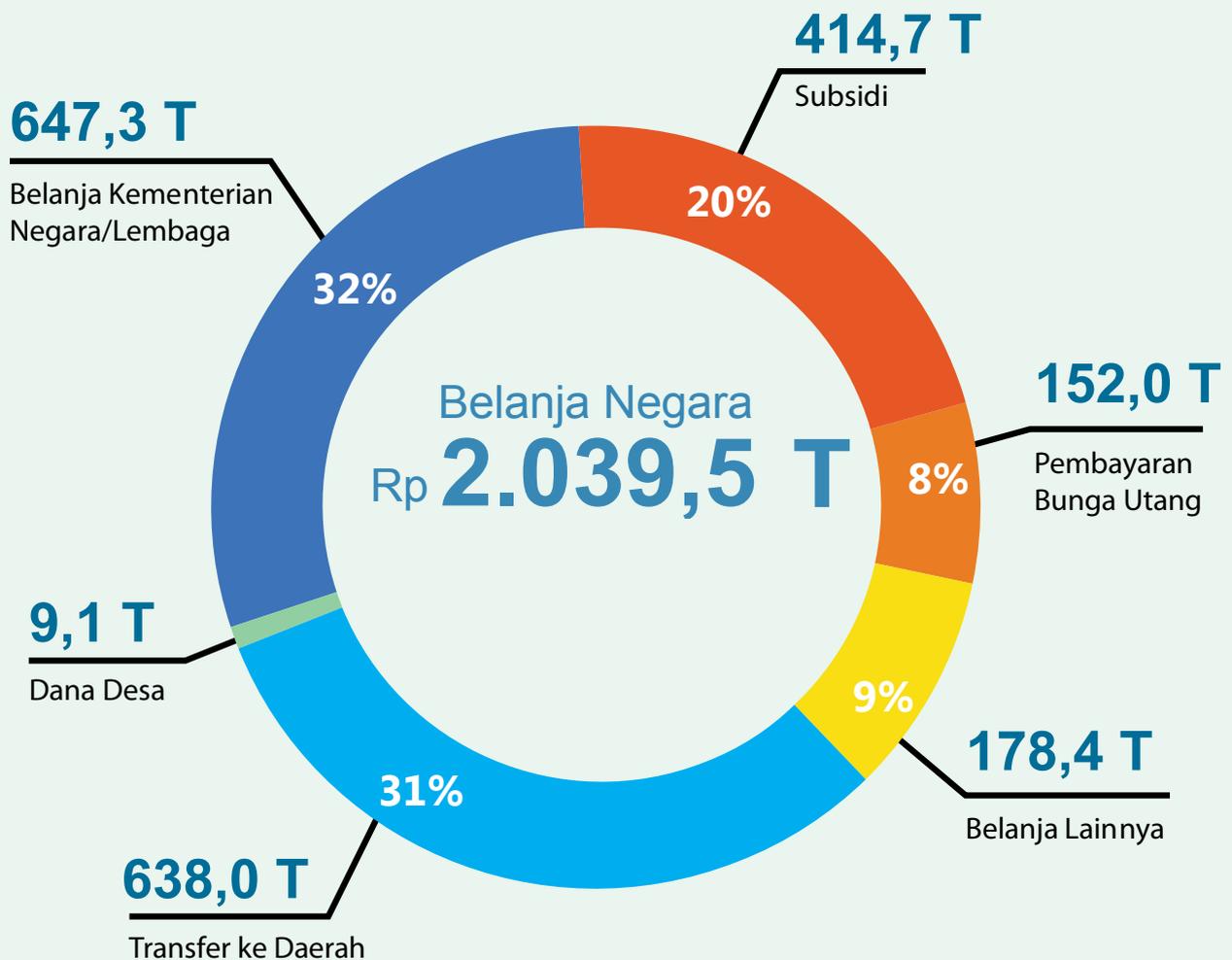
Perbaikan administrasi dan sistem PNPB.

Perbaikan regulasi PNPB.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2004-2015



BELANJA NEGARA 2015



Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Transfer ke Daerah

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja lainnya

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian/Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa.

Dana Desa

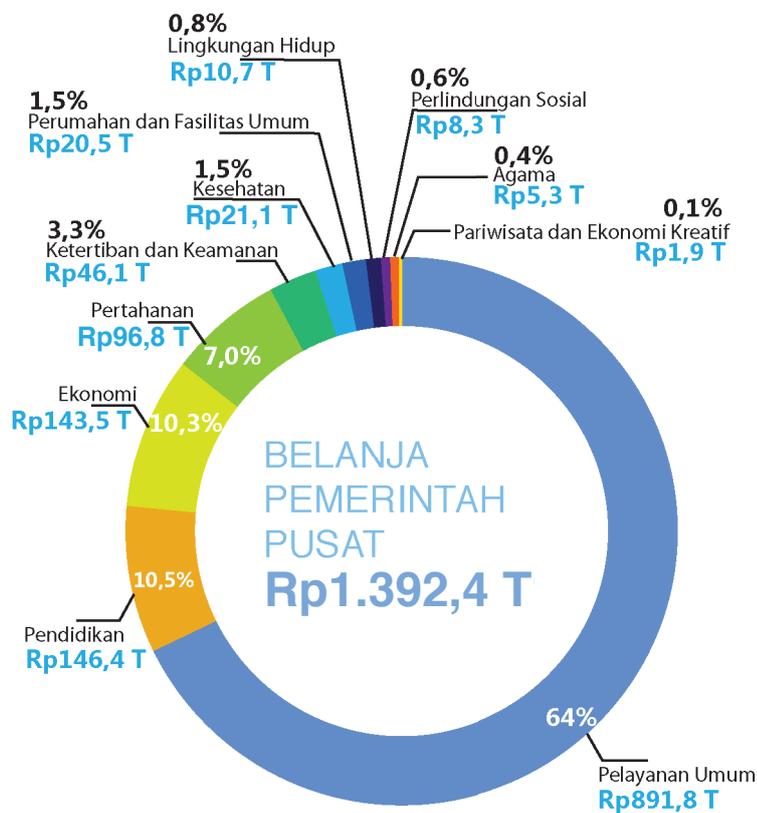
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Subsidi

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2015

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2012-2015



TRILIUN RUPIAH

NO.	FUNGSI	2012 LKPP	2013 LKPP	2014 APBNP	2015 APBN
1	PELAYANAN UMUM	648,0	705,7	856,1	891,8
2	PERTAHANAN	61,2	87,5	83,2	96,8
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29,1	36,1	35,9	46,1
4	EKONOMI	105,6	108,1	114,0	143,5
5	LINGKUNGAN HIDUP	8,8	10,6	10,3	10,7
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	26,4	33,8	27,1	20,5
7	KESEHATAN	15,2	17,6	12,1	21,1
8	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,5	1,8	1,7	1,9
9	AGAMA	3,4	3,9	3,7	5,3
10	PENDIDIKAN	105,2	115,0	129,2	146,4
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5,1	17,1	7,0	8,3
TOTAL		1.010,6	1.137,2	1.280,4	1.392,4

Keterangan : Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2014
 Sumber : Kementerian Keuangan

Fungsi Pelayanan Umum a.l terdiri dari Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);

Fungsi Pertahanan a.l terdiri dari Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;

Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l terdiri dari Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas;

Fungsi Ekonomi a.l terdiri dari Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

Fungsi Lingkungan Hidup a.l terdiri dari Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l terdiri dari Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Fungsi Kesehatan a.l terdiri dari Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

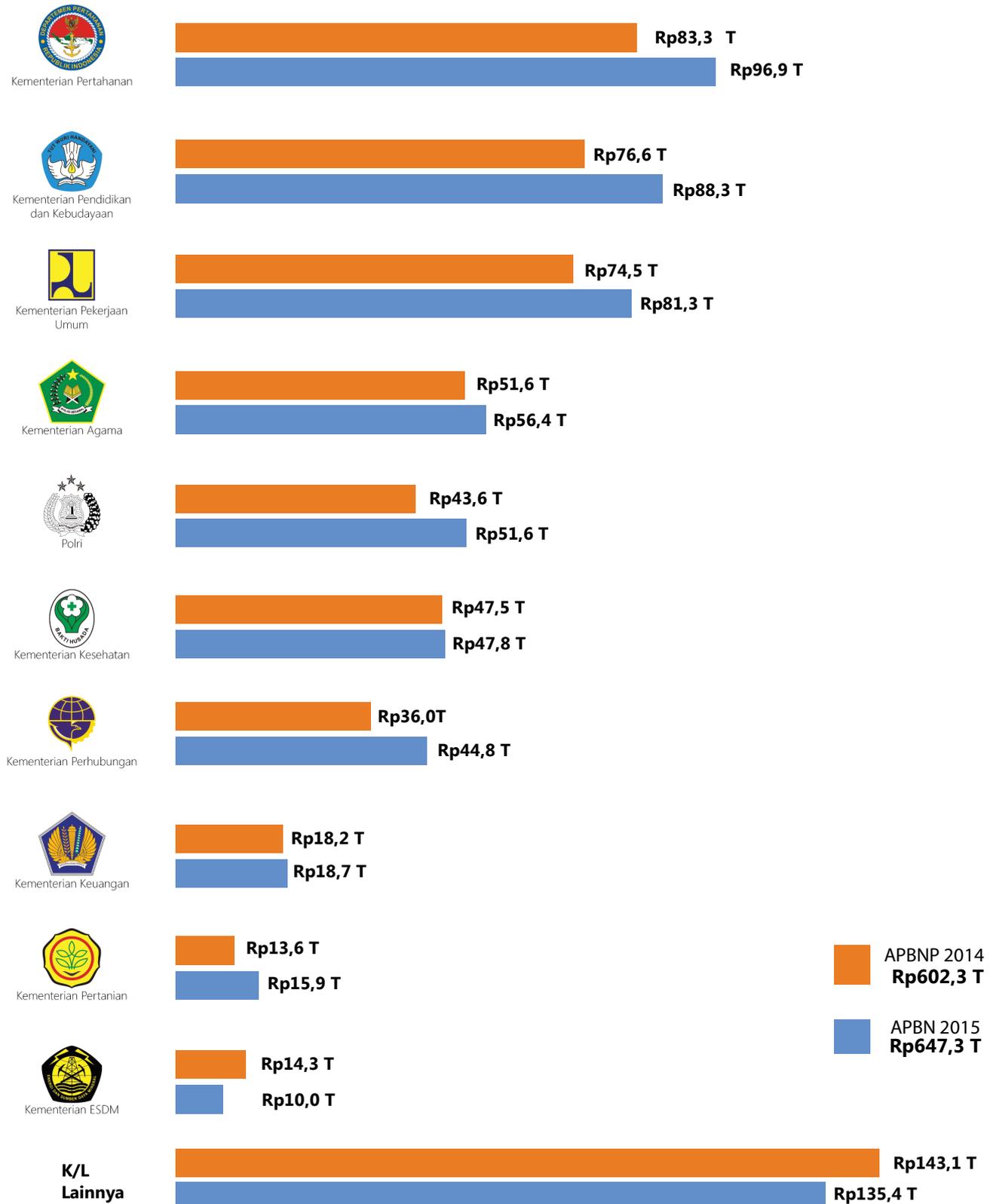
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;

Fungsi Agama a.l terdiri dari Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;

Fungsi Pendidikan a.l terdiri dari Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;

Fungsi Perlindungan Sosial a.l terdiri dari Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).

ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2015

PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penanganan isu strategis, yang antara lain mencakup penguatan konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan, dan diversifikasi pemanfaatan energi.



Kementerian Pekerjaan Umum:
APBNP 2014--Rp74,5 triliun
APBN 2015 --Rp81,3 triliun

Kementerian Perhubungan:
APBNP 2014--Rp36,0 triliun
APBN 2015 --Rp44,9 triliun

Infrastruktur Perhubungan: Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah

Pembangunan jalan baru sepanjang 143 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 m, dan pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1.213,3 m.

Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus.

Pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi dan Pengembangan *bus rapid transit* (BRT) sebanyak 50 unit.

Pembangunan 5 bandar udara baru, pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute.

Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan dan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi.



Kementerian ESDM:
APBNP 2014--Rp14,3 triliun
APBN 2015 --Rp10,0 triliun

Infrastruktur Energi dan Lainnya: Menunjang Ketahanan Energi

Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 519 KMS (*on going*) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk sebesar 2.680 MVA (*on going*) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA.

Penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 RTS.

Produksi/*lifting* migas, terdiri dari minyak bumi sebanyak 830-900 MBOPD dan gas bumi sebanyak 1.235-1.260 MBOEPD.

Penambahan jaringan gas pada dua kota.

Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%.



Kementerian Perumahan
Rakyat:
APBNP 2014--Rp4,0 triliun
APBN 2015 --Rp4,6 triliun

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Pembangunan 120 *twin block* rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyediaan fasilitas dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan swadaya sebanyak 20.000 unit.

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan.



Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan:
APBNP 2014--Rp76,6 triliun
APBN 2015 --Rp88,3 triliun

Kementerian Agama:
APBNP 2014--Rp51,6 triliun
APBN 2015 --Rp56,4 triliun

Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas

Meningkatkan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain:

Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/Mts/Wustha.

Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak.

Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi.

Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan.



Kementerian Sosial:
APBNP 2014--Rp6,7 triliun
APBN 2015 --Rp8,1 triliun

Kementerian Koperasi dan
UMKM:
APBNP 2014--Rp1,4 triliun
APBN 2015 --Rp1,5 triliun

Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial
- Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat
- Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
- Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah

Sasaran utama tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:

Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat memeriksakan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya.

Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi.

Catatan: target-target di atas merupakan target dalam RKP 2015.

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Kementerian Kesehatan:
APBNP 2014--Rp47,5 triliun
APBN 2015 --Rp47,8 triliun

BPOM:
APBNP 2014--Rp1,0 triliun
APBN 2015 --Rp1,2 triliun

Kesehatan Murah untuk Masyarakat

Program di bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 91%

Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 puskesmas.

Jumlah balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita.

Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi masing-masing sebanyak 61 rumah sakit dan 50 puskesmas.

Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 225 kabupaten/kota.

Persentase anak balita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua sebesar 90%.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar 35%.

Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%.

Program ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri



Kementerian Pertanian:
APBNP 2014--Rp13,6 triliun
APBN 2015 --Rp15,9 triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan:
APBNP 2014--Rp5,7 triliun
APBN 2015 --Rp6,7 triliun

Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

Peningkatan produksi padi mencapai 734 juta ton GKG.

Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha.

Peningkatan produksi perikanan menjadi 13,5 juta ton, perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton.

Pengembangan jaringan dan optimasi air melalui pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, dan tata air mikro untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan seluas 350.000 ha.

Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit.

Perluasan sawah seluas 40.000 ha, dan perluasan areal hortikultura/ perkebunan/ peternakan seluas 25.000 ha.

Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144 kawasan mandiri pangan.

PERUBAHAN IKLIM

Program di bidang perubahan iklim diarahkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim



Kementerian Kehutanan:
APBNP 2014--Rp4,5 triliun
APBN 2015 --Rp5,6 triliun

Kementerian Lingkungan Hidup:
APBNP 2014--Rp0,9 triliun
APBN 2015 --Rp0,8 triliun

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi, dan transportasi

Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ) dan pengetahuan tradisional.

Catatan: target-target di atas merupakan target dalam RKP 2015.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN

Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan difokuskan antara lain pada peningkatan kemampuan memantau dan mendeteksi ancaman terorisme, serta peningkatan daya guna industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri.



Polri:
APBNP 2014--Rp43,6 triliun
APBN 2015 --Rp51,6 triliun

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582.

Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%.

Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/ internasional sebesar 11%.

Peningkatan *clearance rate* tindak pidana di wilayah polda sebesar 52%.

Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 Polres untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.



Kementerian Pertahanan:
APBNP 2014--Rp83,3 triliun
APBN 2015 --Rp96,9 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

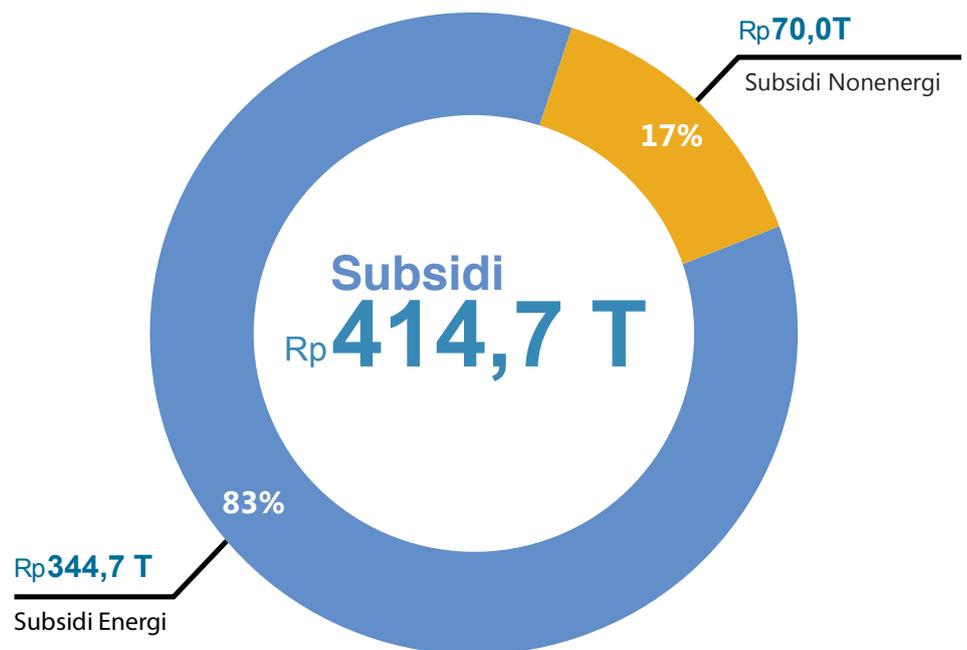
Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40% matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%).

Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 8%.

SUBSIDI 2015

Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2015:

- Stabilitas harga kebutuhan pokok
- Daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin
- Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok
- Daya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat



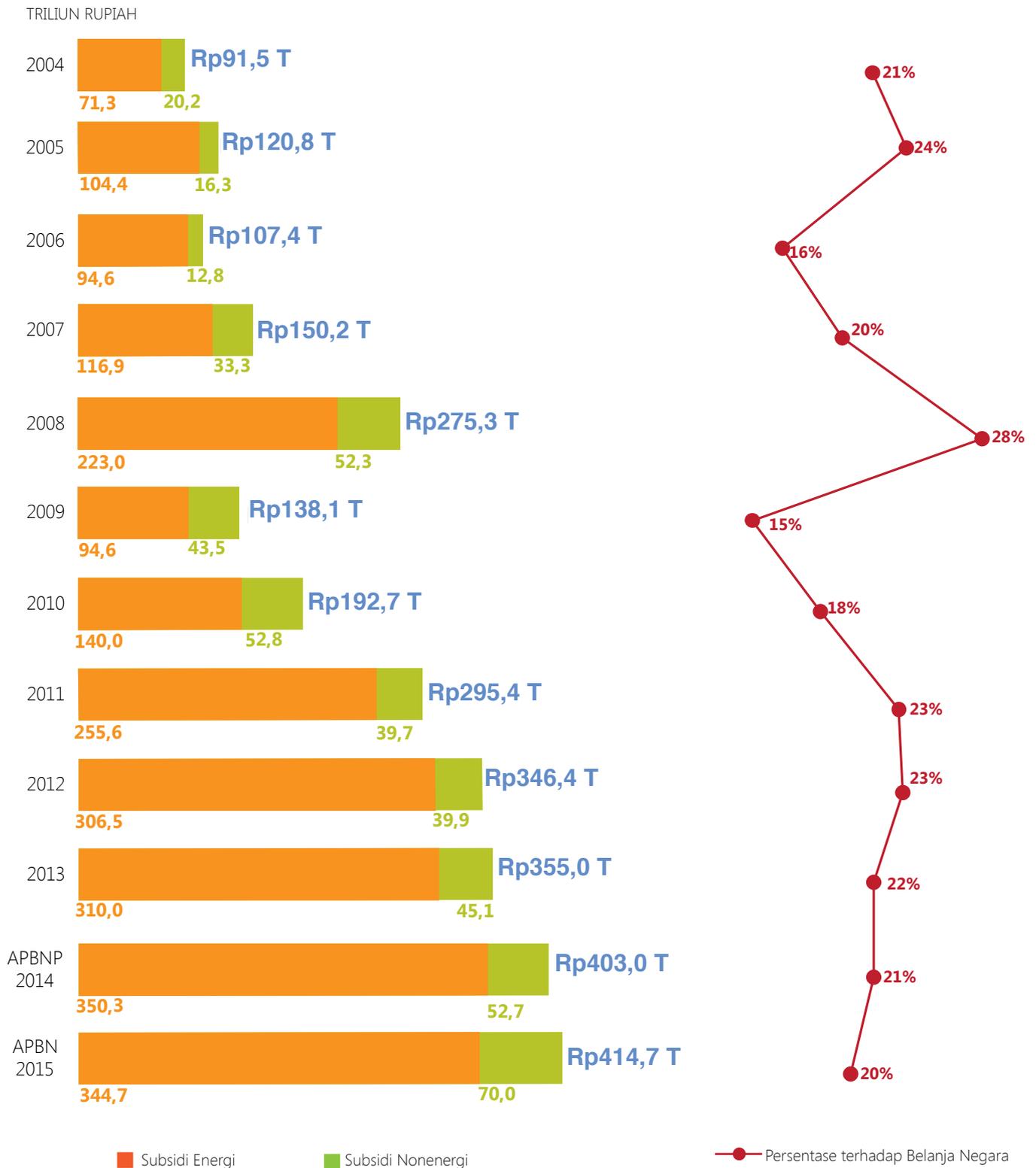
Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN, LPG 3KG, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

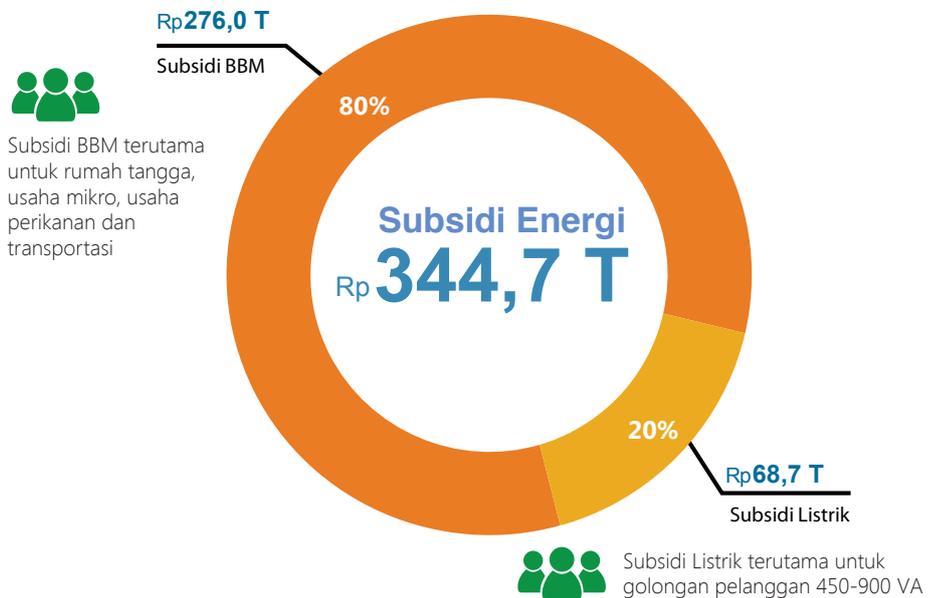
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

PERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015



SUBSIDI ENERGI 2015

 Volume Premium: **29,5 juta KL**
  Volume Minyak Tanah: **0,8 juta KL**
  Volume Minyak Solar: **15,7 juta KL**
  Volume LPG 3 KG: **5,8 metrik ton**



Subsidi BBM:
Rp276,0 T



Subsidi Listrik:
Rp68,7 T

Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM.

Mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.

Melanjutkan konversi BBM ke BBG.

Melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013).

Mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan.

Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran.

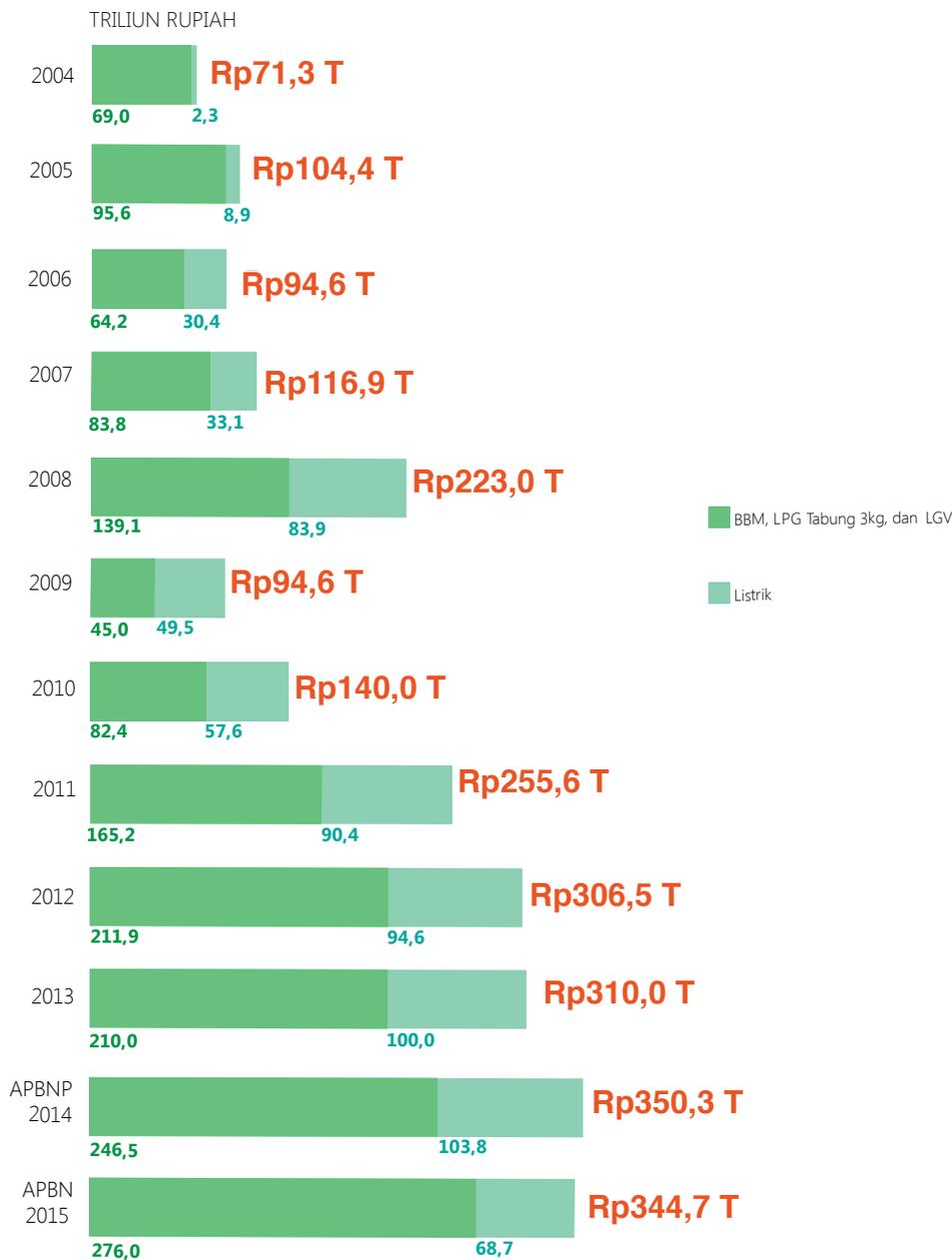
Meningkatkan rasio elektrifikasi.

Menurunkan susut jaringan.

Menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik.

Meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi.

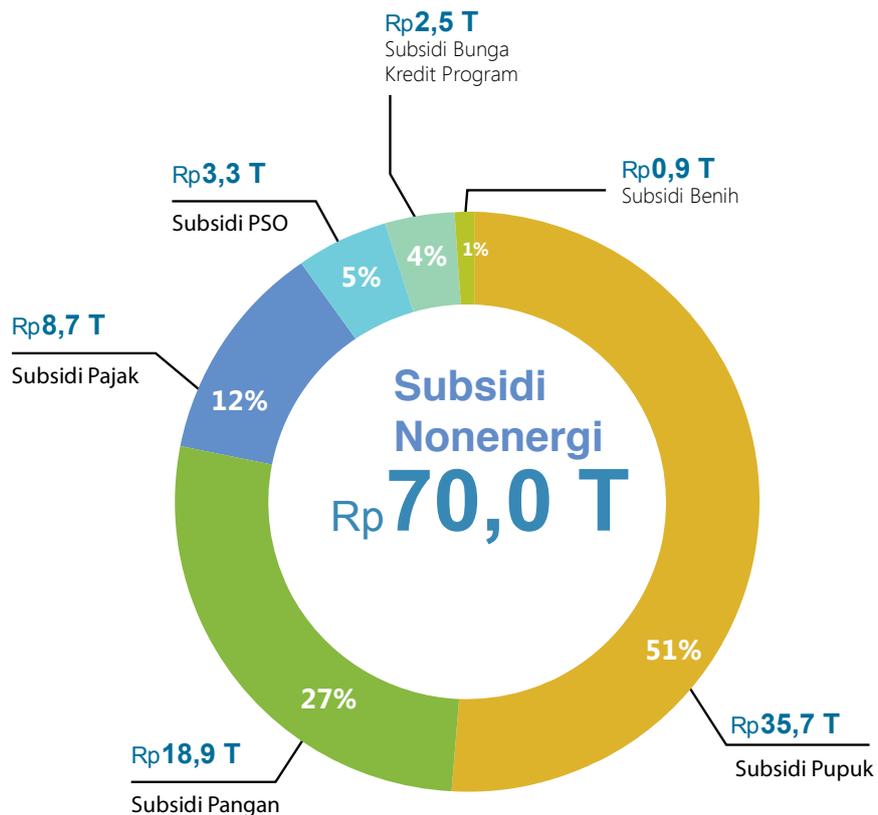
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015



VOLUME KONSUMSI BBM BERSUBSIDI 2004-2015



SUBSIDI NONENERGI 2015



Subsidi Pangan:
Rp18,9 T

Penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan.



Subsidi Pupuk:
Rp35,7 T
Subsidi Benih:
Rp0,9 T

Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.



Subsidi PSO:
Rp3,3 T

Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.



Subsidi Bunga Kredit Program:
Rp2,5 T

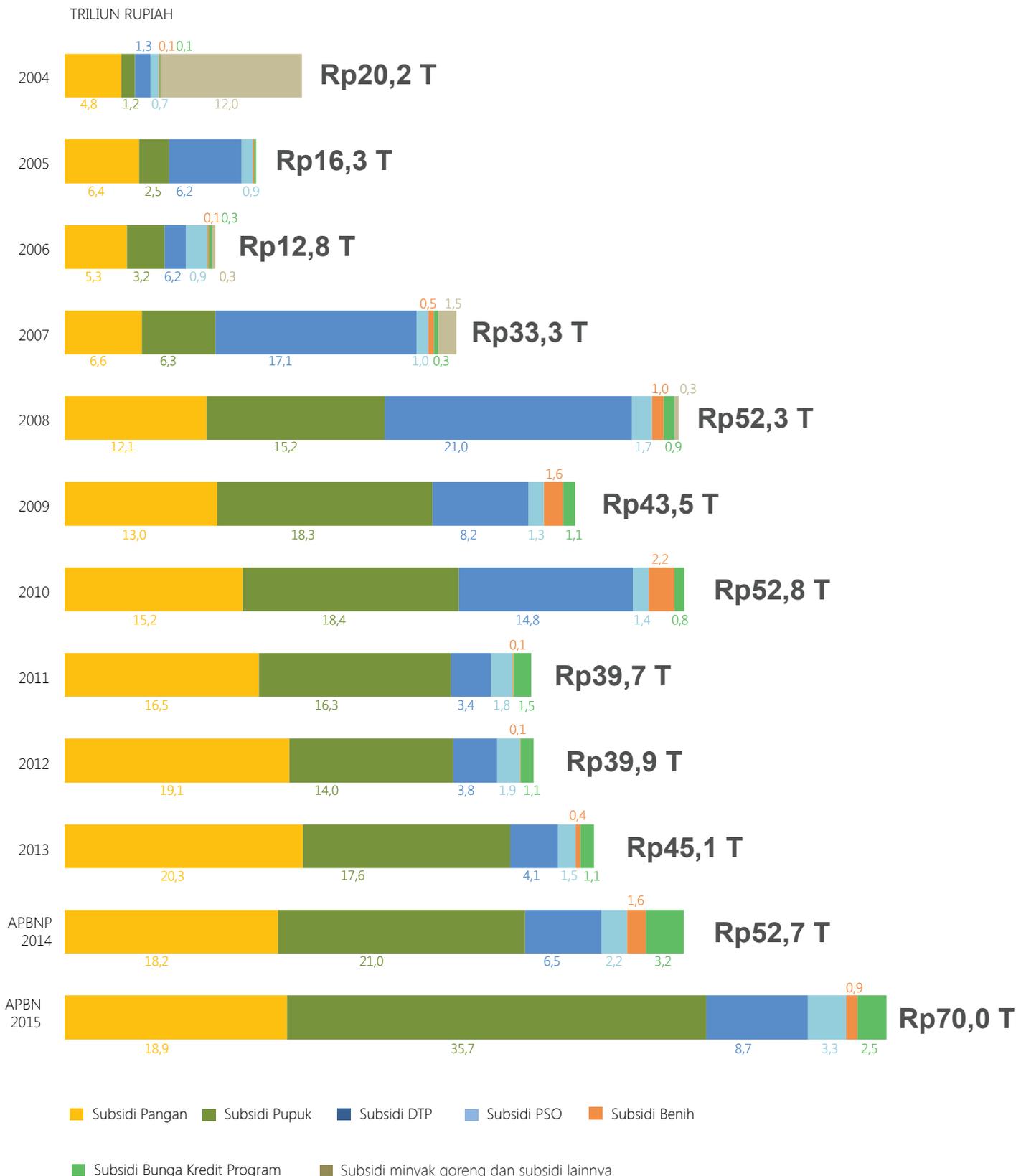
Mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi.



Subsidi DTP:
Rp8,7 T

Mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.

PERKEMBANGAN SUBSIDI NON ENERGI 2004-2015



PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2015



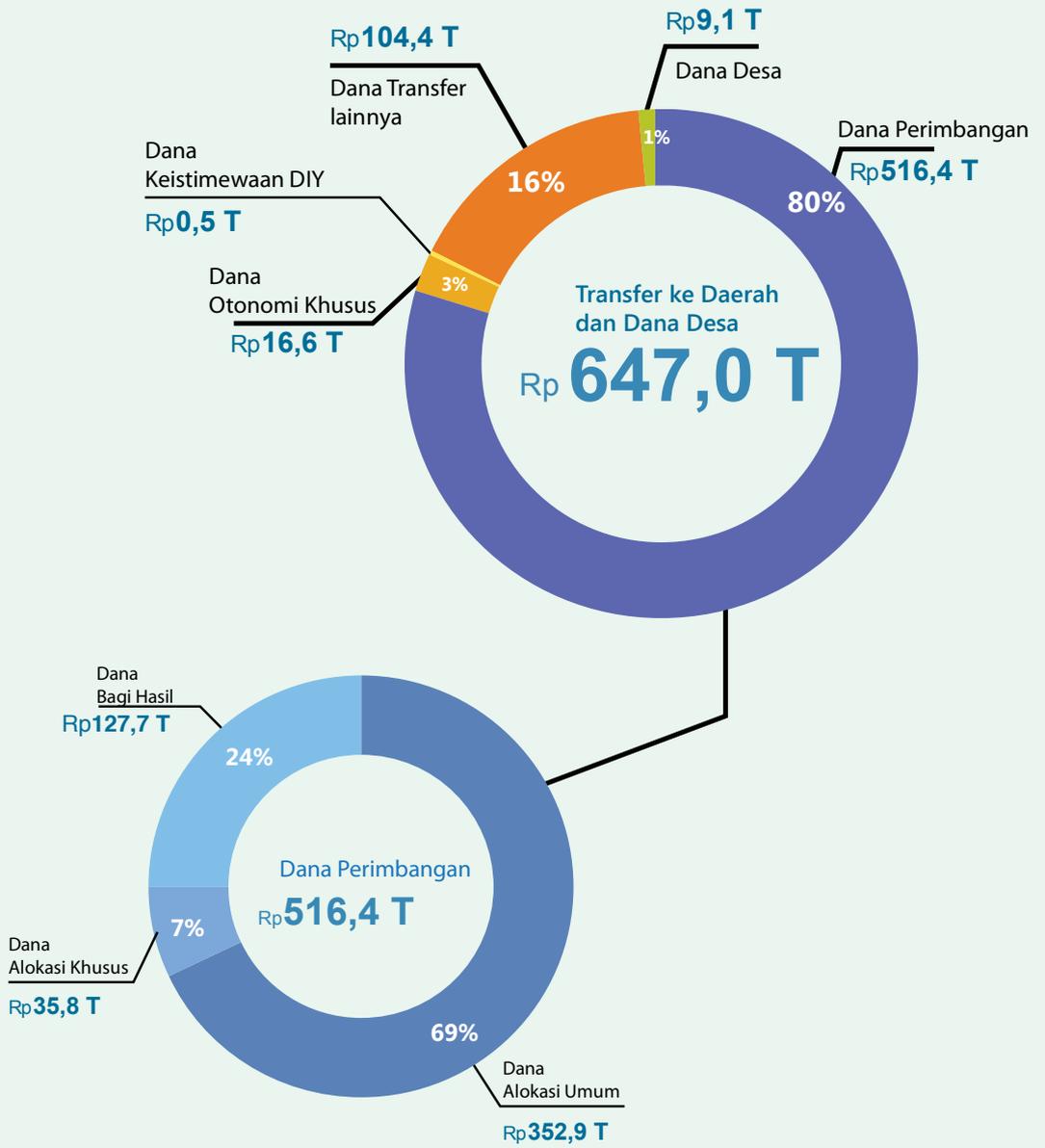
Pembiayaan utang memiliki konsekuensi pembayaran bunga yang dalam APBN 2015 dialokasikan sebesar Rp152,0 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri Rp138,0 triliun dan luar negeri Rp14,0 triliun.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2015

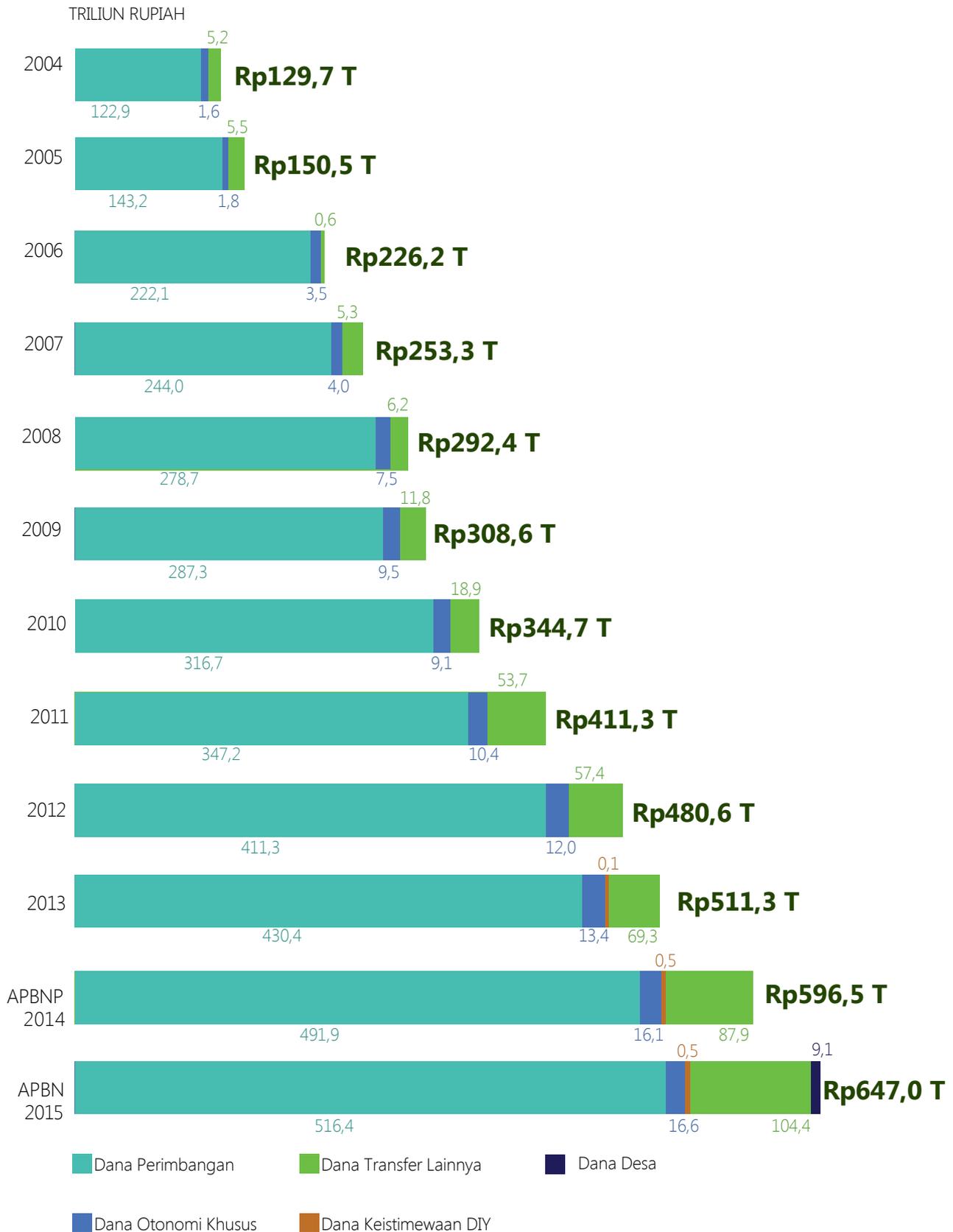
Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan;

Menjaga efisiensi, antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang dan mempertimbangkan pelaksanaan lindung nilai.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2015



PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015



KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2015

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana.

Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

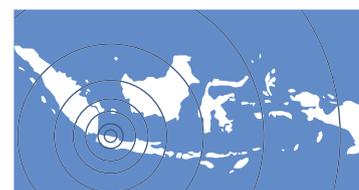
Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana Transfer ke Daerah.

Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui realokasi belanja Pemerintah Pusat yang berbasis desa dengan mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

DANA PERIMBANGAN



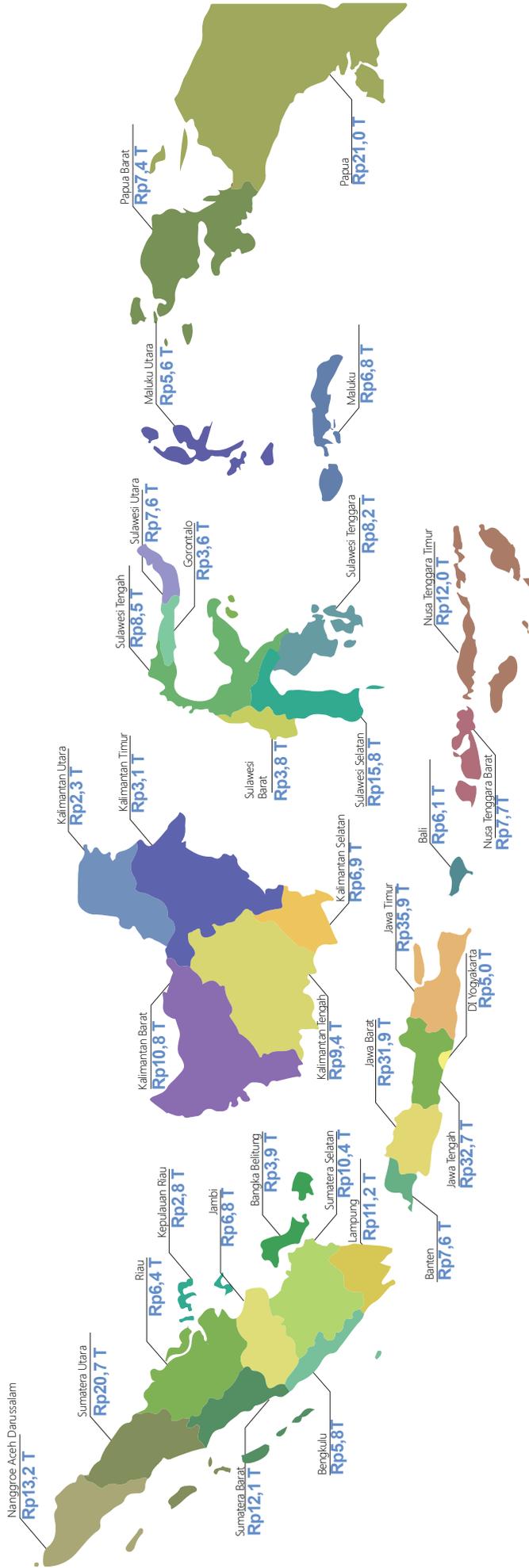
Dana Bagi Hasil

Rp127,7 T

Dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T.

Dana Alokasi Umum Rp352,9 T

dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.



Dana Alokasi Khusus

Rp35,8 T

Dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional yang terdiri dari 14 bidang. DAK dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T).

DAK Tambahan untuk melanjutkan *affirmative policy* bagi daerah tertinggal, untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi (Rp2,8 T).

DAK Pendidikan

Rp10,0 T

DAK Kesehatan

Rp3,4 T

DAK Infrastruktur Irigasi

Rp2,4 T

DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Rp2,5 T

DAK Transportasi

Rp8,7 T

DAK Energi Perdesaan

Rp0,7 T

DAK Prasarana Pemerintahan Daerah

Rp0,6T

DAK Pertanian

Rp2,7 T

DAK Kelautan dan Perikanan

Rp2,0 T

DAK Lingkungan Hidup

Rp0,6 T

DAK Kehutanan

Rp0,7 T

DAK Keluarga Berencana

Rp0,6 T

DAK Sarana Perdagangan

Rp0,8 T

DAK Perumahan dan Permukiman

Rp0,3 T

DANA TRANSFER LAINNYA

Dana Transfer Lainnya

Rp104,4 T

Dialokasikan untuk:

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp70,3 T untuk guru bersertifikasi; dan **Rp1,1 T** untuk **tambahan penghasilan guru PNS Daerah** nonsertifikasi.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.



DANA OTONOMI KHUSUS



Dana Otonomi Khusus

Rp16,6 T

Dialokasikan untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat Rp2,1 T, Provinsi Aceh Rp7,0 T, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur untuk Provinsi Papua Rp2,0 T dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T.

Dana tambahan Otsus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

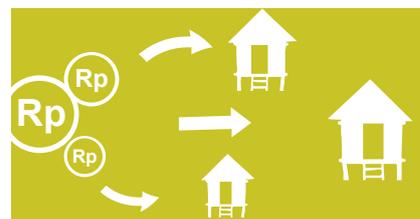
Rp547,5 miliar

untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

DANA DESA

Rp9,1 T

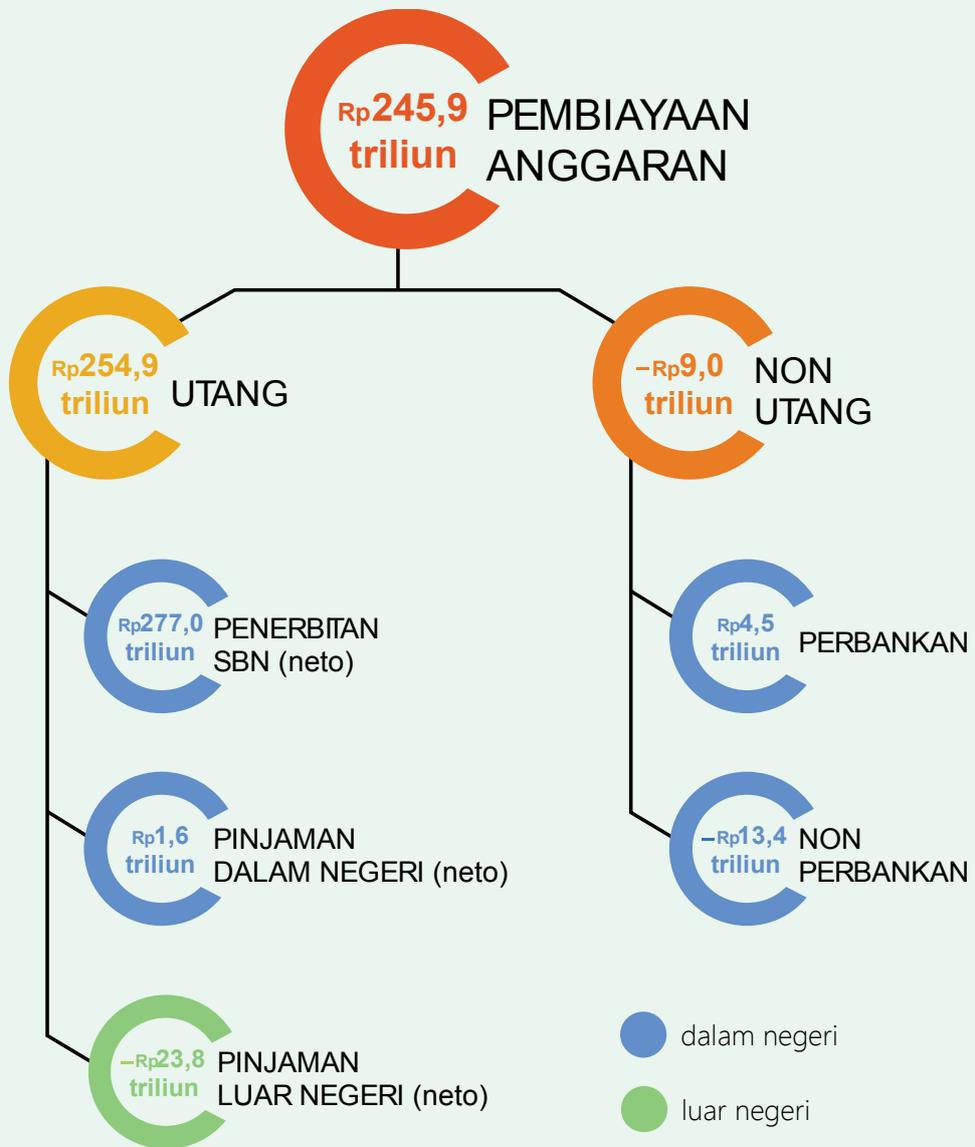
Dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.



Selain dana desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/ kota berupa:

- bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah (PDRD) kabupaten/ kota paling sedikit 10 %;
- alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

PEMBIAYAAN ANGGARAN 2015



SBN meliputi surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)

Pinjaman dalam negeri neto merupakan semua penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman dalam negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri

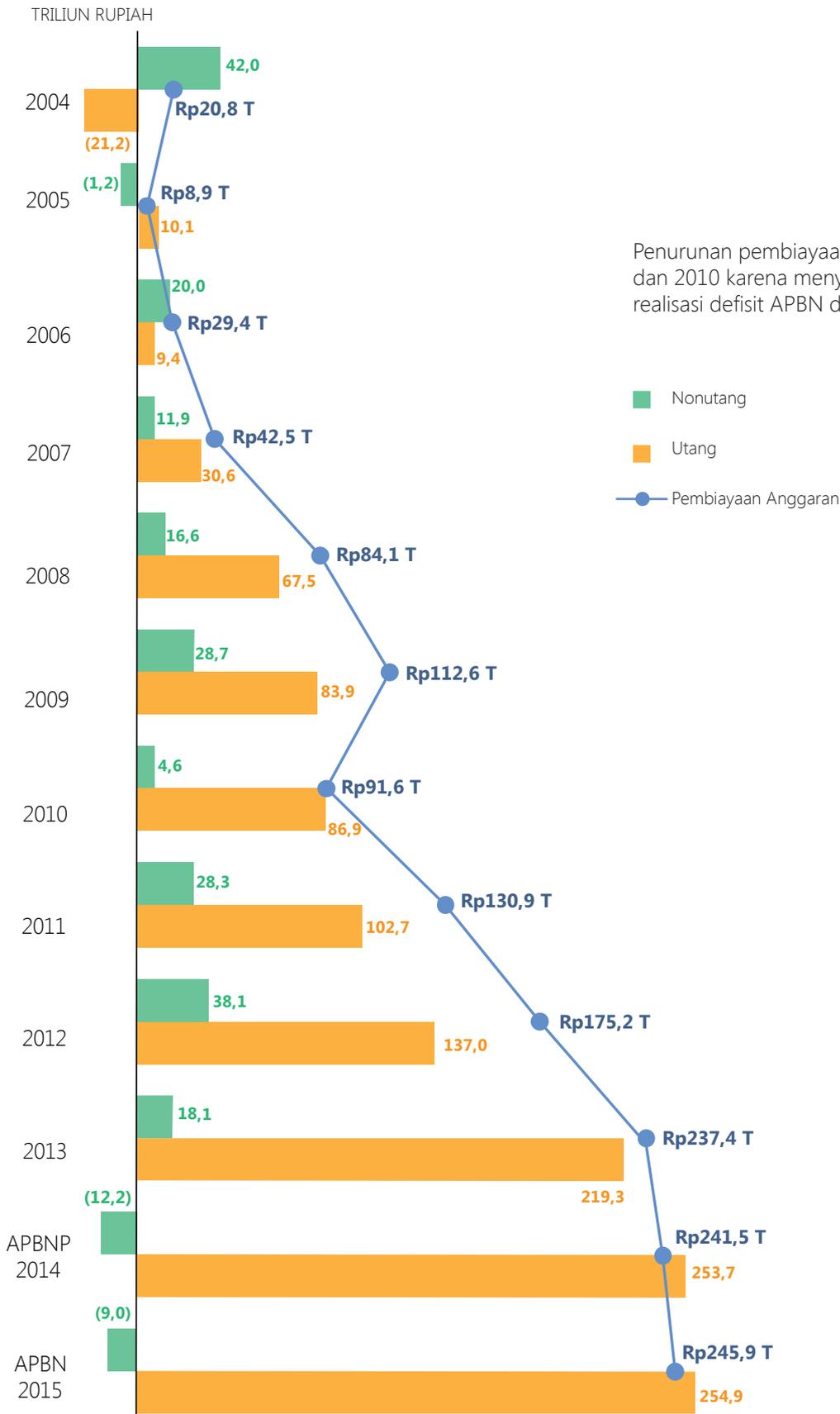
Pinjaman luar negeri neto merupakan semua penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Pembiayaan nonutang dari perbankan berasal dari pembayaran cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

Pembiayaan nonutang dari non perbankan terdiri atas penerimaan dari hasil pengelolaan aset dan penerimaan kembali investasi, dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan.

Angka negatif pada pinjaman luar negeri neto, nonutang, dan nonperbankan menunjukkan nilai komponen pengeluaran di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.

PEMBIAYAAN ANGGARAN 2004-2015



Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2005 dan 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi defisit APBN dari target yang ditetapkan

- Nonutang
- Utang
- Pembiayaan Anggaran

PEMBIAYAAN ANGGARAN 2015

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG 2015

Pengendalian rasio utang terhadap PDB.

Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri.

Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek.

Memfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan *negative net flow*.

Mengoptimalkan peran serta masyarakat (*financial inclusion*) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *asset liabilities management* (ALM).

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NONUTANG 2015

Menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN.

Mengalokasikan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) dan badan usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.

Mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.

Melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional.

Melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

Mengalokasikan dan mengelola dana kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek infrastruktur dengan skema *public private partnership* (PPP).

PENGELUARAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2015

PENYERTAAN MODAL NEGARA

antara lain:



PT PAL Indonesia Rp1,5 T digunakan untuk membangun infrastruktur kapal selam TNI AL guna mendukung pengembangan industri pertahanan.



PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp1,0 T digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.



PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp2,0 T digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha di bidang pembiayaan infrastruktur.



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp1,0 T digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan di pasar keuangan.

DANA BERGULIR



LPDB KUMKM Rp1,0 T digunakan untuk memberikan stimulus bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), berupa penguatan modal.



Pusat Pembiayaan Perumahan Rp5,1 T digunakan untuk membiayai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan pinjaman kepada MBR dengan suku bunga yang rendah dan tetap (*fixed*) selama masa pinjaman.

KEWAJIBAN PENJAMINAN



PT PLN Rp1,1 T dialokasikan untuk pemberian jaminan Pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW dan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.



PDAM Rp2,2 M digunakan untuk program percepatan penyediaan air minum

antara lain:



PT PLN Rp3,3 T digunakan untuk menyediakan infrastruktur dibidang energi kelistrikan.



PT Pertamina Rp0,7 T digunakan untuk meningkatkan pembangkit energi yang berasal dari sumber daya geothermal terbarukan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.



Pemprov DKI Jakarta Rp0,3 T digunakan untuk meningkatkan pengendalian banjir.

PENERUSAN PINJAMAN



Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia